

Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020



Jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Bengkulu
Bengkulu 38225.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pembinaan Akuntansi Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bengkulu, Januari 2021

h. Sekretaris,



SUDIRMAN

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	8
A.4. Dasar Pengukuran	8
A.5. Kebijakan Akuntansi	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan	17
B.2. Belanja	17
B.3. Belanja Pegawai	18
B.4. Belanja Barang	19
B.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1. Aset Lancar	21
C.2. Kas Di Bendahara Pengeluaran	21
C.3. Persediaan	21
C.4. Peralatan dan Mesin	22
C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	22
C.6. Ekuitas	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	24
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO	24
D.2. Beban Pegawai	24
D.3. Beban Persediaan	25
D.4. Beban Jasa	25
D.5. Beban Pemeliharaan	25
D.6. Beban Perjalanan Dinas	26
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	26
D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	27
D.9. Beban Lain-lain	27
D.10. Kegiatan Non Operasional	27
D.11. Pos Luar Biasa	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1. Ekuitas Awal	30

E.2. Surplus (Depisit) LO	30
E.3. Koreksi Nilai Persediaan	30
E.4. Koreksi Aset Tetap	31
E.5. Koreksi atas Beban	31
E.6. Koreksi atas Pendapatan	31
E.7. Ekuitas Akhir	
F. Pengungkapan Penting Lainnya	32
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	32
F.2. Pengungkapan Lain-lain	32

Daftar Lampiran Laporan-laporan Pendukung :

1. Laporan Operasional Per 31 Desember 2020
2. Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2020
3. Neraca Per 31 Desember 2020
4. Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2020
5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Per 31 Desember 2020
6. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Per 31 Desember 2020
7. LRA Pendapatan Negara dan Hibah Per 31 Desember 2020
8. LRA Pengembalian Pendapatan Negara & Hibah Per 31 Desember 2020

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019	3
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2020 dan 2019	4
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang	15
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel 5 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	17
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019	17
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019	17
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019	18
Tabel 9 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019	19
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2019	19
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019	20
Tabel 12 : Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2020 dan 2019	21
Tabel 13 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	21
Tabel 14 : Rincian Persediaan	22
Tabel 15 : Rincian Belanja Dibayar di Muka	23
Tabel 16 : Rincian Pendapatan PNBP-LO Per 31 Desember 2020 dan 2019	24
Tabel 17 : Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2020 dan 2019	24
Tabel 18 : Rincian Pendapatan PNBP-LO Per 31 Desember 2020 dan 2019	25
Tabel 19 : Rincian Beban Jasa	25
Tabel 20 : Rincian Beban Pemeliharaan	26
Tabel 21 : Rincian Beban Perjalanan Dinas	26
Tabel 22 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	26
Tabel 23 : Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	27
Tabel 24 : Rincian Aset Tetap	27
Tabel 25 : Rincian Kegiatan Non Operasional	28
Tabel 26 : Rincian Pos Luar Biasa	28
Tabel 27 : Rincian Koreksi Nilai Persediaan	29
Tabel 28 : Rincian Koreksi Antar Beban	29
Tabel 29 : Rincian Koreksi Antar Pendapatan	29
Lampiran : Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset	32
A1 Tetap	
Lampiran : Informasi Pendapatan dan Belanja Aktual
A2	

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp89.954.729.834. atau mencapai 78.00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp115.364.510.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.831.230.963. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp24.618.898.008.; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.831.230.963.; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp27.450.128.971.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp27.450.128.971. yang terdiri dari hanya Kewajiban Jangka Pendek. Dan nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp27.450.128.971.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit pos luar biasa, dan surplus/defisit LO.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp88.296.861.001. sehingga terdapat deficit dari kegiatan operasional sebesar Rp-88.296.861.001. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0. dan deficit sebesar Rp-222.900. sehingga entitas mengalami deficit LO sebesar Rp-88.297.083.901.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.506.476.611. dikurangi deficit-LO sebesar Rp-88.297.083.901. kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp113.240.736.261. sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp27.450.128.971.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Jl. KAPUAS RAYA NO. 82 LINGKAR BARAT BENGKULU

TELP. 0736 21805, FAXIMILE 0736 347983, MAIL : keuangan_kpubengkulu@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkulu, Januari 2021

P/h. Sekretaris,



SUDIRMAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Semester II TA 2020		% Real.	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI	Angg.	REALISASI
PENDAPATAN	A.1.				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1.b.	-	-	0,00	1.573.949
Jumlah Pendapatan		-	-	0,00	1.573.949
BELANJA	B.1.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.1.a.	4.374.203.000	4.107.004.692	93,89	4.468.674.391
Belanja Barang	B.1.b.	109.983.996.000	85.036.324.242	77,32	16.922.913.971
Jumlah Belanja Operasi		114.358.199.000	89.143.328.934	77,95	21.391.588.362
Belanja Modal					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.1.c.	1.006.311.000	811.400.900	0,00	364.000.000
Jumlah Belanja Operasi		1.006.311.000	811.400.900	0,00	364.000.000
Jumlah Belanja Negara		115.364.510.000	89.954.729.834	77,97	21.755.588.362

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rp)

Uraian	Catatan	31 Des 2020	30 Des 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran		0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas		24,612,008,008	0
Piutang Bukan Pajak	C.1	0	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)		0	0
Persediaan		6,890,000	12,261,900
Persediaan yang Belum Diregister		0	0
Jumlah Aset Lancar		24,618,898,008	12,261,900
ASET TETAP			
Tanah		308,484,000	308,484,000
Peralatan dan Mesin		4,095,027,480	3,285,866,580
Peralatan dan Mesin Belum Register		0	0
Gedung dan Bangunan		792,800,000	792,800,000
Aset Tetap Lainnya		0	0
Akumulasi Penyusutan		(2,365,478,747)	(1,894,304,391)
Jumlah Aset Tetap		2,831,230,963	2,492,846,189
JUMLAH ASET		27,450,128,971	2,506,476,611
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga		0	0
Uang Muka dari KPPN		0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas		27,450,128,971	2,506,476,661
Jumlah Ekuitas		27,450,128,971	2,506,476,661
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27,450,128,971	2,506,476,611

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

II. NERACA

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rp)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PNBP Lainnya	-	-	-
Pendapatan BLU	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-
Jumlah Pendapatan Operasional	-	-	-
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	4.107.004.692	4.468.674.391	(361.669.699)
Beban Persediaan	140.429.000	404.573.701	(264.144.701)
Beban Jasa	78.606.453.722	10.977.848.745	67.628.604.977
Beban Pemeliharaan	152.687.650	408.775.200	(256.087.550)
Beban Perjalanan Dinas	4.818.141.289	4.173.074.100	645.067.189
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Beban Bunga	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	472.144.648	393.441.816	78.702.832
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-
Jumlah Beban Operasional	88.296.861.001	20.826.387.953	67.470.473.048
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(88.296.861.001)	(20.826.387.953)	(67.470.473.048)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	572.100	14.525.449	(13.953.349)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	795.000	16.426.488	(15.631.488)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(222.900)	(1.901.039)	1.678.139
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(88.297.083.901)	(20.828.288.992)	(67.468.794.909)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT – LO	(88.297.083.901)	(20.828.288.992)	(67.468.794.909)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

II. NERACA

**KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam Rp)

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	2.506.476.611	1.429.273.228
SURPLUS/DEFISIT – LO	(88.297.083.901)	(20.828.288.992)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	-
Lain-lain		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	113.240.736.261	21.905.492.375
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	24.943.652.360	1.077.203.383
EKUITAS AKHIR	27.450.128.971	2.506.476.611

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Lingkar Barat Bengkulu, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berkomitmen dengan visi “01. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. 02. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan. 03. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif. 04. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 05. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.”

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi

yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Akuntansi dan pelaporan berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
(Kementerian Negara.Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

*Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja*

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban/terjadinya konsumsi aset/terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Kebijakan
Akuntansi atas
Aset

(5) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana*

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas

piutang diatur sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan

dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

*Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama pos-pos ekuitas dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis akuntansi kas menuju akrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan Negara
Rp0.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Belanja
Negara
Rp89.954.729.834.

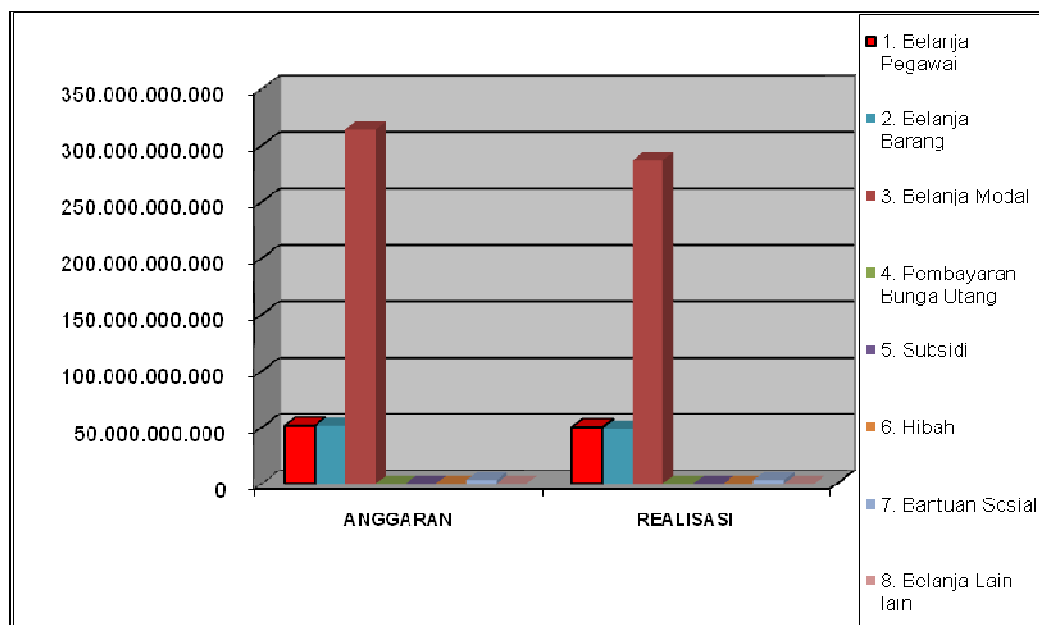
B.2. Belanja

Realisasi belanja Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada TA 2020 adalah sebesar Rp89.954.729.834. atau 78,00 persen dari anggaran senilai Rp115.364.510.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2020 tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	4.374.203.000	4.107.004.692
Belanja Barang	109.983.996.000	85.036.324.242
Belanja Modal	1.006.311.000	811.400.000
Total Belanja Kotor	115.364.510.000	89.954.728.934
Pengembalian Belanja		-
Belanja Netto	115.364.510.000	89.954.728.934

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2020 dan TA 2019 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 78,00 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2019.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja modal meningkat dalam rangka mendukung rencana kerja strategis;
2. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.107.004.692	4.468.674.391	(8,09)
Belanja Barang	85.036.324.242	16.922.913.971	402,49
Belanja Modal	811.400.900	364.000.000	122,91
Jumlah Belanja	89.954.729.834	21.755.588.362	313,48

Belanja Pegawai
Rp4.107.004.692.

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada TA 2020 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.107.004.692. dan Rp4.468.674.391. Berdasarkan Tabel 8, realisasi belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar (8,09) persen dari realisasi belanja TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.
2. Adanya mutasi pegawai ke unit dan instansi lain.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.499.881.284	1.489.564.390	0,69
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	2.607.308.550	2.979.666.092	(12,50)
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	4.107.189.834	4.469.230.482	(8,10)
Pengembalian Belanja Pegawai	185.142	556.091	-
Jumlah Belanja Bersih	4.107.004.692	4.468.674.391	(8,09)

Belanja Barang
Rp85.036.324.242.

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp85.036.324.242. dan Rp16.922.913.971.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan (402,49) persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain adanya penghematan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas pegawai.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	3.297.558.750	1.781.122.526	85,14
Belanja Barang Non Operasional	76.703.117.703	2.759.185.000	64,60
Belanja Jasa	64.818.850	7.748.093.645	(99,16)
Belanja Pemeliharaan	152.687.650	408.775.200	(62,65)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.818.141.289	4.177.772.100	15,33
Jumlah Belanja Kotor	85.036.324.242	16.874.948.471	403,92
Pengembalian Belanja	-	47.965.500	-
Jumlah Belanja Bersih	85.036.324.242	16.922.913.971	402,49

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp809.160.900.

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp809.160.900. dan Rp364.000.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan peralatan dan mesin untuk mengganti yang sudah tidak beroperasi dengan kapasitas penuh;

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A 2019	Naik (Turun) %
Komputer Unit	0	0	0,00
Peralatan	809.160.900	364.000.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	809.160.900	364.000.000	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	809.160.900	364.000.000	0,00

Penambahan dari nilai pembelian senilai	Rp.809.160.900,-
1. 1 (satu) Buah Lemari Besi Rp.3.200.000,-	Rp. 3.200.000,-
2. 1 (satu) Unit CCTV Rp.31.845.000,-	Rp. 31.845.000,-
3. 1 (satu) Unit Alat Perekam Suara SONY Rp.1.300.000,-	Rp. 1.300.000,-
4. 1 (satu) Buah Meja Kerja Kayu SL80 Rp.1.700.000,-	Rp. 1.700.000,-
5. 5 (lima) Unit Kursi Kayu Rp.19.306.000,-	Rp. 96.530.000,-
6. 1 (satu) Unit Meubelair Rp.1.400.000,-	Rp. 1.400.000,-
7. 2 (dua) Unit Jam Elektronik Rp.1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
8. 1 (satu) Unit Laptop CORE I7 Rp.18.500.000,-	Rp. 18.500.000,-
9. 1 (satu) Unit Handy Cam Sony Rp.20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
10. 1 (satu) Unit Mic Wireless MIC Ashley Rp.19.000.000,-	Rp. 19.000.000,-
11. 1 (satu) Unit Camera Digital Rp.5.500.000,-	Rp. 5.500.000,-
12. 1 (satu) Set Video Conference Rp.89.200.000,-	Rp. 89.200.000,-
13. 7 (tujuh) Unit Alat Komunikasi Lainnya	Rp. 160.000.000,-
14. 8 (delapan) Laptop	Rp. 180.295.900,-
15. 1 (satu) Personal Komputer Lainnya	Rp. 25.000.000,-
16. 1 (satu) Scanner	Rp. 15.000.000,-
17. 8 (delapan) Printer	Rp. 22.600.000,-
18. 5 (lima) Scanner	Rp. 53.600.000,-
19. 4 (empat) Scanner	Rp. 5.550.000,-
20. 3 (tiga) Scanner	Rp. 56.940.000,-

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

ASET

Aset Lancar

Rp24.618.898.008

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp24.618.898.008. dan Rp12.261.900.

Aset Lancar per 31 Desember 2020 terdiri dari Persediaan, sedangkan pada TA 2019 Aset Lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya dan Setara Kas dan Persediaan.

Rincian Aset Lancar pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2020 dan TA 2019 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 12
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Aset Lancar	Per 31 Des 2020	TA 2019
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	24.612.008.008	-
3	Persediaan	6.890.000	12.261.900
4	Persediaan yang Belum Diregister	-	-
Jumlah		24.618.898.008	12.261.900

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C.2. Kas Di Bendahara pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari GUP.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 13
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Aset Lancar	Per 31 Des 2020	TA 2019
1	Uang Tunai	-	-
Jumlah		-	-

Persediaan Rp6.890.000

C.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp6.890.000. dan Rp12.261.900.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 tersaji pada Tabel 10.

Tabel 14
Rincian Persediaan

No	Persediaan	T.A 2020	T.A 2019
1	Persediaan	6.890.000	12.261.900
	Jumlah	6.890.000	12.261.900

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Peralatan dan Mesin
Rp4.095.027.480

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp4.095.027.480. dan Rp3.285.866.580.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	3.285.866.580
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	809.160.000
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	4.095.027.480
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp	(2.365.080.517)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp	6.460.107.997

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa:

- Penambahan dari nilai pembelian senilai Rp(0).
- Pengurangan dari nilai penyusutan senilai Rp(-2.365.080.517).

Rincian set tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(2.365.080.517)

C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp(2.365.080.517). dan Rp(1.894.304.391).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 11, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Tabel 15
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
2	Peralatan dan Mesin	Rp 3.285.866.580	Rp (2.365.080.517)	Rp 5.650.947.097
3	Peralatan & Mesin Blm Regist	Rp -	Rp -	Rp -
4	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -
5	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
6	Akumulasi Penyusutan	Rp -	Rp -	Rp -
	Akumulasi Penyusutan	Rp 3.285.866.580	Rp (2.365.080.517)	Rp 5.650.947.097

Ekuitas

Rp27.450.128.971

C.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp27.450.128.971. dan Rp2.506.476.611.

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp0

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-LO pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

Pendapatan PNB-LO merupakan hak pemerintah atas pendapatan PNB karena adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, tanpa harus memperhatikan adanya aliran kas masuk ke rekening kas negara.

Rincian pendapatan PNB-LO disajikan pada Tabel 12.

Tabel 16
Rincian Pendapatan PNB-LO pada 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	Naik (Turun) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	-
2. Pendapatan Jasa	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan jasa merupakan pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pelatihan. Sedangkan pendapatan lain-lain merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2020.

Beban Pegawai
Rp4.107.004.692

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.107.004.692. dan Rp4.468.674.391.

Beban pegawai adalah beban atas kewajiban kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai disajikan pada Tabel 13.

Tabel 17
Rincian Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji	4.107.004.692	4.468.674.391	(8,09)
Beban Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium			
Beban Lembur		-	-
Jumlah	4.107.004.692	4.468.674.391	(8,09)

Beban Persediaan
Rp140.429.000

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp140.429.000. dan Rp404.573.701.

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi, baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian beban persediaan disajikan pada Tabel 14.

Tabel 18
Rincian Pendapatan PNBP-LO pada 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	140.429.000	404.573.701	(65,29)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang			
Beban Persediaan Lainnya		-	-
Jumlah	140.429.000	404.573.701	(65,29)

Beban Jasa
Rp78.606.453.722

D.4. Beban Jasa

Beban Jasa pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp78.606.453.722 dan Rp10.977.848.745.

Beban jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian beban jasa disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 19
Rincian Beban Jasa

Uraian	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Langganan Daya & Jasa	78.606.453.722	10.977.848.745	616,05
Beban Jasa Pos & Giro	-	-	-
Beban Jasa Konsultasi			
Beban Jasa Lainnya		-	-
Jumlah	78.606.453.722	10.977.848.745	616,05

Beban Pemeliharaan
Rp152.687.650

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp152.687.650. dan Rp408.775.200.

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan disajikan dalam Tabel 16.

Tabel 20
Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	152.687.650	408.775.200	(62,65)
Beban Pemeliharaan Jaringan			
Beban Pemeliharaan Lainnya		-	-
Jumlah	152.687.650	408.775.200	(62,65)

Beban Perjalanan Dinas
Rp4.818.141.289

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp4.818.141.289. dan Rp4.173.074.100.

Beban perjalanan dinas tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian beban perjalanan dinas disajikan dalam Tabel 17.

Tabel 21
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	4.818.141.289	4.173.074.100	15,46
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Beban Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota		-	-
Jumlah	4.818.141.289	4.173.074.100	15,46

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp472.144.648

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp472.144.648. dan Rp393.441.816.

Baban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat asset tersebut. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk asset tak berwujud.

Rincian beban penyusutan dan amortisasi tersaji pada Tabel 18.

Tabel 22
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	472.144.648	393.441.816	20,00
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan			-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud			-
Jumlah	472.144.648	393.441.816	20,00

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0.

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktagihan piutang dalam satu periode tahun anggaran berjalan.

Rincian beban penyisihan piutang tak tertagih tersaji pada Tabel 19.

Tabel 23
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih

Uraian	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - P	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - P	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Lain-lain Rp0

D.9. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0.

Beban lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja XXXX.

Rincian beban lain-lain disajikan pada Tabel 20.

Tabel 24
Rincian Aset Tetap

Uraian	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan & M	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung & Ba	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya			-
Jumlah	-	-	-

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.10. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/deficit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian surplus/deficit dari kegiatan non operasional disajikan pada Tabel 21.

Tabel 25
Rincian Kegiatan Non Operasional

Uraian	2020	2019	Naik (Turun) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan alat angkut darat	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat kantor	-	-	-
Defisit selisih kurs	-	-	-
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasio	-	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.11. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pendaptan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan tidak dapat diramalkan, serta berada di luar kendali entitas. Rincian pos luar biasa tahun 2020 dan 2019 disajikan pada Tabel 21.

Tabel 26
Rincian Pos Luar Biasa

Uraian	2020	2019	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan			-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan PNBP di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat akibat bencana tanah longsor. Sedangkan beban perjalanan dinas dan beban persediaan merupakan beban-beban yang digunakan langsung dalam rangka tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp25.446.905.540.

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp25.446.905.540. dan Rp30.302.163.821.

Defisit LO

Rp(20.551.627.070)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(20.551.627.070) dan Rp.(175.374.716.914).

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/deficit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Persediaan

Rp0

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp0. dan Rp0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan disajikan dalam Tabel 22.

*Tabel 27
Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

No	Jenis	T.A. 2020
1	Barang Konsumsi	-
2	Suku Cadang	-
3	Barang Persediaan Lainnya	-
4		-
Jumlah		-

Kas Lainnya dan Setara

Kas Rp0

E.4. Koreksi Aset Tetap

Koreksi aset tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset tetap pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

Nilai koreksi nilai asset tetap tersebut adalah koreksi nilai gedung dan bangunan.

Koreksi atas Beban Rp 0

E.5. Koreksi atas Beban

Koreksi atas beban merupakan korekasi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

Koreksi atas beban untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian koreksi atas beban disajikan dalam Tabel 23.

Tabel 28
Koreksi antar Beban

No	Jenis	T.A. 2020	T.A. 2019
1	Beban pegawai	-	-
2	Beban Jasa	-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

Koreksi atas pendapatan
Rp0

E.6. Koreksi atas Pendapatan

Koreksi atas pendapatan merupakan korekasi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

Koreksi atas pendapatan untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian koreksi atas pendapatan disajikan dalam Tabel 24.

Tabel 29
Koreksi antar pendapatan

No	Uraian	T.A. 2020	T.A. 2019
1	Pendapatan jasa	-	-
2	Pendapatan lainnya	-	-
3		-	-
4		-	-
Jumlah		-	-

Ekuitas Akhir
Rp47.564.722.706

E.7. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp47.564.722.706. dan Rp21.010.107.186.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 01 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada tanggal 02 Januari 2019.

Kuasa Pengguna Anggaran	: Sudirman
Pejabat Pembuat Komitmen	: Sudirman
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: M. Benny Eka Putra
Bendahara	: Sugiono

Lampiran A1

Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A	Peralatan dan Mesin		1,234,827,600	(1,506,098,613)	2,921,866,580
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	579,461,000	0	579,461,000
2	Lemari Besi / Metal	22	59,685,000	0	59,685,000
3	Filling Kabinet Besi	18	44,215,000	0	44,215,000
4	CCTV – Camera Control Television System	3	14,000,000	0	22,617,000
5	Mesin Absensi	1	5,454,600	0	44,454,600
6	LCD Projector / Infocus	1	6,400,000	0	13,220,000
7	Papan Pengumuman	1	3,000,000	0	3,000,000
8	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1,500,000	0	1,500,000
9	Mesin Pemotong Rumput	1	1,700,000	0	4,200,000
10	Televisi	6	45,000,000	0	80,542,000
11	Sound System	1	40,000,000	0	67,600,000
12	Mimbar / Podium	1	4,000,000	0	4,000,000
13	Digital LED Running Text	1	4,000,000	0	4,000,000
14	Camera Film	1	15,000,000	0	15,000,000
15	Camera Digital	1	12,000,000	0	46,252,750
16	Handy Talky (HT)	3	7,500,000	0	7,500,000
17	Genset	1	199,600,000	0	199,600,000
18	Kursi Zeis	45	93,000,000	0	102,513,000
19	Personal Computer	5	61,230,000	0	94,230,000
20	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	5,000,000	0	5,000,000
21	P. C. Unit	1	7,500,000	0	79,783,000
22	Lap Top	12	187,000,000	0	318,966,975
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	39,702,000	0	99,111,000
24	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	58,900,000	0	77,593,000
25	External	4	4,800,000	0	7,200,000
26	External/Portable Hardisk	1	1,000,000	0	5,947,500
27	Air Conditioning (AC)	7	39,900,000	0	44,400,000
Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap			1,234,827,600	(1,506,098,613)	2,921,866,580
Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			1,234,827,600	(1,506,098,613)	2,921,866,580



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-151691/WPB.08/KP.016/2020

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara KPU PROVINSI BENGKULU (654340) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BENGKULU, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2020.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	115,364,510,000	115,364,510,000	0
2	Belanja	89,954,914,976	89,954,914,976	0
3	Pengembalian Belanja	-185,142	-185,142	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	24,612,008,008	24,612,008,008	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Nama Belum Direkam
NIP Belum Direkam



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
KPA Satker

Sudirman
NIP.197211251995031001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: KPU PROVINSI BENGKULU (654340)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 115,364,510,000

SAI/SA-BUN : 115,364,510,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 89,954,914,976

SAI/SA-BUN : 89,954,914,976

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -185,142

SAI/SA-BUN : -185,142

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 24,612,008,008

SAI/SA-BUN : 24,612,008,008

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Nama Belum Direkam
NIP Belum Direkam



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
KPA Satker

Sudirman
NIP.197211251995031001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah